

## PENERAPAN *PEACE EDUCATION* DALAM KONTEKS NEGARA KONFLIK: SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW

Labibatussolihah<sup>1</sup>, Nour Muhammad Adriani<sup>2</sup>

Universitas Pendidikan Indonesia<sup>1</sup>, Australian National University<sup>2</sup>

e-mail: [labibatussolihah@upi.edu](mailto:labibatussolihah@upi.edu)

### ABSTRAK

Trauma sejarah umumnya terjadi di negara-negara yang telah mengalami konflik berkepanjangan seperti perang saudara, genosida, dan dikuasi oleh rezim yang otoriter. Trauma ini membentuk memori kolektif akan luka yang terjadi sehingga muncul prasangka, stereotipe, dan ketegangan antar kelompok yang menjadikan warga negara krisis identitas. Proses penyembuhan akan luka psikis yang diwariskan ini memerlukan upaya rekonstruksi kembali tatanan sosial, politik, dan moral mereka. Dalam konteks tersebut, peace education menjadi pendekatan utama untuk menanamkan nilai toleransi, empati, rekonsiliasi, serta keadilan sosial sebagai dasar pembentukan global citizenship yang berorientasi pada tindakan positif demi terwujudnya masyarakat yang damai. Studi ini menggunakan metode Systematic Literature Review pada basis data scopus pada tahun 2020-2025 dengan menggunakan Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis (PRISMA) melalui kata kunci "peace education". Diperoleh 2787 artikel yang kemudian direduksi dengan fokus pada negara-negara konflik diantaranya Rwanda, Sierra Leone, Kamboja, dan Afrika Selatan yang hasilnya 9 artikel terpilih untuk dianalisis lebih mendalam. Hasil kajian mengungkapkan: 1) latar belakang historis mempengaruhi penerapan peace education dinegara pasca konflik; 2) peace education berkontribusi terhadap pembentukan kemampuan resolusi konflik; 3) pendekatan multiperspektif memberikan dampak positif dan negative; 4) peace education melalui affective recognition membentuk empati dan ikatan emosi lintas generasi; 5) perlu adanya keterlibatan berbagai pihak ditingkat local, nasional, dan internasional dalam penerapan peace education di negara pasca konflik.

**Kata Kunci:** *peace education, masyarakat pasca konflik, pendidikan sejarah, isu global*

### ABSTRACT

Historical trauma commonly occurs in countries that have experienced prolonged conflict, such as civil war, genocide, and rule by authoritarian regimes. This trauma forms a collective memory of the wounds that occurred, resulting in prejudice, stereotypes, and intergroup tensions that lead citizens to an identity crisis. The process of healing these inherited psychological wounds requires efforts to reconstruct their social, political, and moral order. In this context, peace education is a primary approach to instilling the values of tolerance, empathy, reconciliation, and social justice as the foundation for forming global citizenship oriented towards positive actions for the realization of a peaceful society. This study uses a Systematic Literature Review method on the Scopus database from 2020-2025, applying the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis (PRISMA) using the keyword "peace education." A total of 2,787 articles were obtained, which were then reduced to a focus on conflict-affected countries including Rwanda, Sierra Leone, Cambodia, and South Africa. The resulting nine articles were selected for further in-depth analysis. The result finds that: 1) historical background influences the implementation of peace education in post-conflict countries; 2) peace education contributes to the development of conflict resolution capabilities; 3) a multi-perspective approach has positive and negative impacts; 4) peace education through affective recognition forms empathy and emotional bonds across generations; 5) there is a need

for the involvement of various parties at the local, national and international levels in the implementation of peace education in post-conflict countries.

**Keywords:** *peace education, post-conflict societies, history education, global issue*

## PENDAHULUAN

Konflik berkepanjangan yang melanda sebuah negara secara sistematis akan membentuk memori kolektif yang mendalam bagi seluruh elemen bangsanya, bahkan terus memengaruhi pola pikir generasi selanjutnya hingga berpuluh-puluh tahun kemudian. Peristiwa traumatis seperti genosida, perang saudara yang brutal, hingga cengkeraman rezim otoriter tidak hanya menyisakan luka fisik yang terlihat, melainkan juga memunculkan luka psikis yang menghancurkan tatanan sosial serta memicu krisis identitas yang akut (Ahmadi, 2021; Karim et al., 2025; Putra et al., 2024). Fenomena ini sering kali melahirkan isu ketidakpercayaan atau *distrust* yang masif terhadap otoritas pemerintah maupun antarkelompok masyarakat tertentu yang sebelumnya terlibat dalam pertikaian. Berbagai residu negatif yang tersisa dari masa kelam tersebut dapat memicu munculnya prasangka buruk, stereotipe yang merugikan, serta ketegangan laten yang tetap bersemayam meskipun secara formal konflik telah dinyatakan berakhir. Warisan pandangan yang bias ini menunjukkan bahwa proses penyelesaian sebuah konflik tidak bisa hanya disandarkan pada pendekatan politik atau diplomasi di tingkat atas saja. Diperlukan upaya yang jauh lebih mendasar untuk memulihkan trauma historis yang telah mengakar dalam memori masyarakat serta membangun sebuah budaya damai yang berkelanjutan demi menjamin keberlangsungan hidup bangsa yang lebih harmonis dan inklusif bagi seluruh warga negara tanpa kecuali (Bain et al., 2024; Bhaskara, 2024; Faiz, 2020; Lestari & Parihala, 2020).

Negara-negara seperti Rwanda, Sierra Leone, Kamboja, dan Afrika Selatan merupakan cerminan nyata dari bagaimana sebuah bangsa bergulat dengan dampak destruktif dari konflik yang berlangsung selama bertahun-tahun. Peristiwa genosida pada 1994 di Rwanda yang melibatkan benturan berdarah antara kelompok Hutu dan Tutsi merupakan salah satu tragedi kemanusiaan paling kelam yang pernah tercatat dalam sejarah modern. Sementara itu, Sierra Leone harus menanggung beban berat akibat perang saudara selama sebelas tahun, tepatnya mulai 1991 hingga 2002, yang dipicu oleh perebutan sumber daya alam yang melimpah namun membawa petaka bagi warga sipil. Di belahan dunia lain, Kamboja mengalami masa kegelapan pada 1975 di bawah rezim Khmer Merah yang melakukan pembersihan etnis secara masif hingga menghilangkan sepertiga populasi negaranya dalam waktu singkat. Di sisi lain, Afrika Selatan menghadapi perjuangan panjang untuk menghapuskan sistem kebijakan *apartheid* yang telah lama merusak relasi sosial, akses pendidikan, hingga struktur politik secara rasial di sana. Rekam jejak sejarah di keempat negara tersebut membuktikan bahwa kekerasan masa lalu selalu meninggalkan jejak permanen bagi generasi penerus berupa keretakan hubungan sosial yang mendalam dan memerlukan penanganan khusus melalui pendekatan yang transformatif (Gallen, 2023; Holm & Deese, 2022; RAHMAWATI et al., 2024; Yanto et al., 2026).

Menghadapi kenangan negatif yang diwariskan oleh sejarah kelam, urgensi mengenai penerapan *peace education* atau pendidikan perdamaian muncul sebagai strategi vital untuk memutus rantai trauma dan membangun kembali harmoni sosial di masyarakat. Penting untuk disadari bahwa institusi pendidikan sering kali dianggap sebagai pedang bermata dua; ia mampu mendorong proses rekonsiliasi yang tulus, namun di sisi lain juga berisiko menghasilkan ketimpangan yang justru memicu perpecahan baru jika tidak dikelola dengan bijaksana. Oleh karena itu, konsep pendidikan perdamaian tidak boleh hanya dipahami secara sempit sebagai proses pengajaran teori tentang perdamaian semata di dalam ruang kelas yang kaku. Pendekatan ini harus bergerak melampaui model rasionalitas murni menuju sebuah proses yang

mengintegrasikan dimensi emosional, spiritual, serta relasional untuk membangun empati dan keterampilan resolusi konflik yang mumpuni bagi siswa. Peserta didik diajak untuk menghargai perbedaan secara autentik serta melewati proses penerimaan terhadap luka masa lalu melalui pembelajaran yang bersifat transrasional dan reflektif. Dengan menyentuh aspek kemanusiaan yang paling mendalam, pendidikan diharapkan dapat menjadi medium penyembuhan kolektif atau *collective healing* bagi masyarakat yang sedang berusaha bangkit dari kehancuran moral akibat kekerasan sistemik (Fatikasari et al., 2026; Sihombing & Habeahan, 2025; Unisa et al., 2025; Utama et al., 2025).

Keberagaman pendekatan yang digunakan oleh berbagai negara pascakonflik menunjukkan bahwa pendidikan perdamaian bersifat sangat kontekstual dan adaptif terhadap latar belakang historis yang melandasinya di masing-masing wilayah. Di Rwanda, fokus utama diarahkan pada resiliensi sosial untuk menyembuhkan luka genosida, sementara Sierra Leone lebih menekankan pada penguatan kapasitas pemuda sebagai agen perubahan pascaperang. Namun, senyatanya di lapangan, generasi muda yang tumbuh di wilayah-wilayah ini sering kali mewarisi trauma secara tidak langsung melalui narasi sejarah lisan atau *oral history* yang penuh dengan rasa takut dan ketidakpercayaan. Kesenjangan muncul ketika kurikulum pendidikan yang idealnya mempromosikan perdamaian berhadapan dengan kenyataan sosial di mana struktur keluarga dan komunitas masih tercerai-berai akibat dampak konflik berkepanjangan. Banyak anak muda yang menghadapi tantangan besar karena harus menanggung beban memori yang terfragmentasi sambil berusaha mencari identitas diri di tengah lingkungan yang masih menyimpan benih ketegangan antarkelompok. Situasi ini menunjukkan bahwa pemulihan kondisi dari yang tidak baik menjadi lebih baik memerlukan transformasi pedagogi yang tidak hanya menyentuh fisik sekolah, melainkan juga harus mampu merubah struktur ketidakadilan yang selama ini menjadi akar konflik tersebut (Amelia et al., 2025; Bransika et al., 2025; Islakh et al., 2025; Khoeriyah et al., 2022; Utama et al., 2025).

Penelitian ini hadir dengan nilai kebaruan yang signifikan melalui upaya untuk menganalisis secara sistematis dan multidimensi mengenai bagaimana berbagai negara pascakonflik melakukan rekonseptualisasi arah pendidikan mereka demi masa depan. Inovasi riset ini terletak pada fokusnya yang tidak hanya melihat reformasi kebijakan secara formal, tetapi juga meneliti bagaimana agen perubahan di tingkat sekolah berperan sebagai pembawa nilai perdamaian yang nyata. Kajian ini bertujuan untuk mensintesis berbagai pendekatan pendidikan perdamaian sebagai instrumen utama dalam mencapai *positive peace*, yakni sebuah kondisi sosial yang dicirikan oleh adanya keadilan, kesetaraan, dan harmoni yang sejati. Dengan mengevaluasi proses transformasi pedagogi dan rekonstruksi nilai-nilai moral di wilayah yang pernah mengalami kehancuran sistemik, penelitian ini berupaya merumuskan sebuah model pendidikan yang sensitif terhadap trauma masa lalu. Studi ini memberikan kontribusi teoretis mengenai pentingnya integrasi dimensi emosional dalam kurikulum sebagai sarana pemulihan relasi sosial yang efektif di negara-negara post-konflik. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang kontribusi pendidikan dalam berdamai dengan masa lalu, diharapkan tercipta sebuah peta jalan bagi dunia untuk membangun jalinan komunitas yang lebih inklusif dan kokoh secara kemanusiaan.

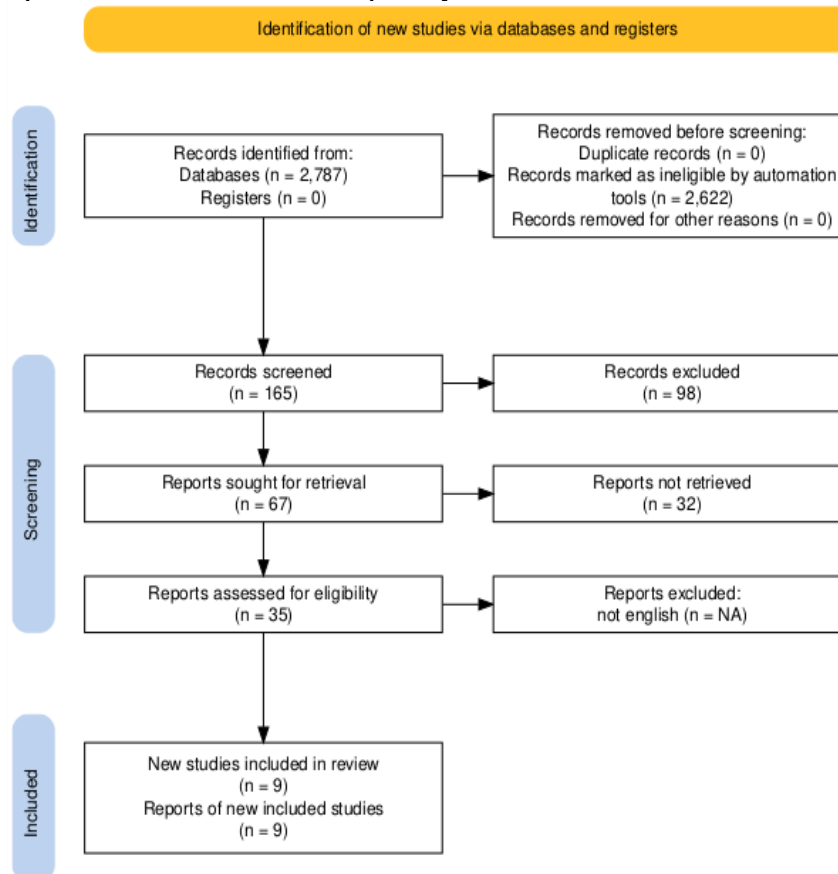
## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan Systematic Literature Review dengan mengkaji artikel-artikel yang membahas konsep dan praktik pendidikan perdamaian di konteks negara pascakonflik. Proses penelaahan dilakukan dengan mengikuti kerangka Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). Fokus utama kajian ini adalah mengidentifikasi peran, implikasi, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi

Copyright (c) 2025 LEARNING : Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran

pendidikan perdamaian khususnya dinegara pasca konflik dalam artikel yang sejak tahun 2020-2025. Hasil studi ini diharapkan mampu untuk memberikan masukan bagi pendidik maupun pemangku kebijakan dalam mempertimbangkan penerapan peace education yang sesuai dengan latar belakang historis dari masing-masing negara.

Penelusuran literatur dilakukan melalui basis data Scopus, dengan ruang lingkup artikel yang diterbitkan antara tahun 2020 hingga 2025 dan menggunakan kata kunci “peace education”. Pencarian awal menghasilkan 2.787 artikel. Seleksi awal berdasarkan kategori social sciences, tipe artikel, bahasa Inggris, dan akses terbuka menghasilkan 67 artikel. Penyaringan lanjutan dilakukan agar lebih fokus pada negara-negara pascakonflik yang hasilnya terdapat sembilan artikel yang relevan, berasal dari Rwanda (3 artikel), Sierra Leone (1 artikel), Kamboja (2 artikel), dan Afrika Selatan (3 artikel). Pemilihan artikel dilakukan melalui tiga tahap: verifikasi kesesuaian judul, pemeriksaan abstrak, dan peninjauan penuh terhadap fokus penelitian serta temuan empirisnya.



**Gambar 1. Prosedur penelitian**

**Tabel 1. Basis data artikel Scopus berdasarkan kata kunci dan fokus studi**

No.	Judul artikel	Tahun	Penulis	Lokasi penelitian
1	Some contradictions of multiple perspectives approaches to peace and history education: lessons from Cambodia	2024	Manning, P., Paulson, J.	Cambodia
2	Affective recognition: examining the role of affect in education for	2024	Hodgkinson, K.	Cambodia and Cosovo

	peacebuilding in Cambodia and Kosovo			
3	Peace Education in a Post-Conflict Society: The Case Study of Sierra Leone	2025	Yu, Y., Wyness, M.	Sierra Leone
4	Reconstruction and Resilience in Rwandan Education Programming: A News Media Review	2023	Dicson, B. A.	Rwanda
5	Sharing and listening to stories for peacebuilding in post-genocide Rwanda	2023	Breed, A., Uwihoreye, C.	Rwanda
6	The relational legacies of colonialism: peace education and reconciliation in Rwanda	2020	Schulz, M., Sentama, E.	Rwanda
7	Confronting a leadership vacuum: the principal's leadership role in peace education in South African schools	2024	Ndwanwe, N. D.	South Africa
8	Barriers to implementing peace education in secondary schools in South Africa	2024	Ndwanwe, N. D.	South Africa
9	Tackling Xenophobia through Dialogue: A Freirean Approach	2020	Jhon, V. M.	South Africa

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peran peace education

Implementasi peace education diberbagai negara post konflik menghadapi dinamika yang berbeda. Peace education sebagai pendekatan disiapkan untuk menginternasiasi pengetahuan, keterampilan dan nilai yang diperlukan untuk menciptakan perdamaian. Di Kamboja, peran pendekatan ini secara konseptual menunjukkan bahwa affective recognition memiliki peran sentral dalam proses membangun peace education (Hodgkinson, 2024). Pemahaman lebih mendalam akan pola pikir korban, pelaku, atau kelompok akan mendorong keterlibatan emosional seseorang. Pada posisi ini, anak muda tidak terbatas pada penerima narasi sejarah tetapi sebagai subjek afektif yang mampu memberikan penilaian kritis serta pandangan baru terhadap tindakan yang dilakukan tentara Khmr Merah tingkat bawah yang selama ini dianggap sebagai pelaku tunggal kekerasan yang terjadi di Kamboja. Mengkonseptualisasikan affective recognition memungkinkan pemahaman tentang bagaimana pendidikan dapat berkontribusi pada pembelajaran perdamaian termasuk melalui proses empati dan perubahan sikap (Hodgkinson, 2024). Terdapat dua inti dari pedagogi multiperspektif yaitu perspektif yang adil dan menyiapkan siswa yang lebih siap sebagai warga negara yang kritis (Manning & Paulson, 2024). Penerapan multiperspektif dalam pendidikan damai juga berperan dengan memberikan alternatif narasi sejarah yang menentang narasi tunggal dari negara. Hal tersebut memberi ruang dialog mengenai pelaku sejarah yang perlu bertanggung jawab akan dampak yang ditimbulkan dari peristiwa kekerasan di Kamboja pada tahun 1975-1979. Kegiatan dengan melakukan peace tour ke Anlong Veng memberikan kesempatan pada peserta tour untuk mengobservasi dan menkontruksi kebenaran melalui interaksi langsung kepada mantan tentara Khmr Merah yang akhirnya muncul “pelaku adalah korban”. Multiperspektif

memberikan pandangan baru akan peristiwa sejarah seiring dengan adanya perubahan identitas historis yang memperlihatkan peran dari peace education.

Pendidikan perdamaian di Rwanda berfungsi sebagai rekonstruksi social pasca terjadinya genosida pada tahun 1994 yang disebabkan konflik permusuhan antara etnis antara Hutu dan Tutsi. Kurikulum yang dikembangkan pascakonflik berdampingan dengan kampanye pembangunan perdamaian di sektor formal dan informal Masyarakat (Breed & Uwihoreye, 2023). Tujuan dari program pendidikan perdamaian adalah mengajarkan siswa menjadi anak yang tangguh dalam menghadapi konflik dan mendorong rekonsiliasi baru antar dua kelompok yang sebelumnya bermusuhan. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu Critical Peace Education (CPE) ini berasal dari barat, sehingga dalam konteks Rwanda dikenalkan Decolonised Critical Peace Education (DCPE) yang lebih spesifik mencakup pengalaman masyarakat adat dan pandangan kritis terhadap CPE akan bagaimana struktur kolonialisasi dapat diruntuhkan (Schulz & Sentama, 2021). Sistem pendidikan perdamaian yang dibangun perlu membangun Masyarakat baru yang inklusif bagi seluruh warga negara, bukan atas nama kelompok-kelompok tertentu. Sehingga tercipta identitas nasional yang sama di Rwanda. Terdapat proyek yang bertujuan membangun perdamaian bernama Mobile Arts for Peace (MAP) yang dikembangkan pada tahun 2018 untuk menghubungkan antara anak-anak dan remaja, pendidik, seniman, pekerja masyarakat sipil, dan pembuat kebijakan (Breed & Uwihoreye, 2023). Inisiatif ini mengartikan adanya kepedulian dalam berbagi cerita dalam konteks pendidikan perdamaian dapat mengatasi konflik-hari-hari dan memperkuat identitas kolektif sebagai bagian dari agenda rekonsiliasi nasional. Selain itu, melihat media memframing tentang pendidikan perdamaian di Rwanda memiliki peranan yang berdampak dalam pembentukan konsep damai itu sendiri. Program peace education telah merubah narasi dari konflik yang sebenarnya menjadi program pendidikan yang bertujuan untuk menciptakan informasi.

Perang saudara yang terjadi di Sierra Leone pada awal tahun 1991 sampai 2002 dipicu dari kombinasi kesenjangan historis, politik, ekonomi dan pendidikan yang terjadi antara di daerah perkotaan dan pedesaan. Elit perkotaan acapkali meminggirkan penduduk pedesaan, kemerosotan ekonomi yang terjadi pada tahun 1970-an dan 1980-an yang diperparah oleh program penyesuaian struktural dan devaluasi mata uang, memperparah kemiskinan dan pengangguran menjadikan pemuda dipedesaan semakin terpinggirkan. Muncul mahasiswa radikal maupun pemuda tidak berpendidikan menunjukkan adanya marginalisasi dalam system pendidikan dan ekonomi yang secara langsung bersinggungan juga dengan politik (Yu & Wyness, 2025). Pasca terjadinya perang saudara menjadikan pendidikan memiliki peran yang strategis dalam memulihkan situasi negara tersebut melalui perubahan struktur dan kebijakan pendidikan yang memberikan kesempatan pada anak-anak secara adil untuk dapat kembali bersekolah pasca konflik bekepanjangan. Hal ini mendorong inisiatif untuk mengintegrasikan peace education kedalam kurikulum, pemahaman tentang perdamaian dan pendidikan dibentuk oleh faktor-faktor historis, sosial, dan budaya (Yu & Wyness, 2025). Peace education menjadi komponen penting dalam melakukan rekonstruksi dengan melihat dua pilar yakni pilar struktur dan pilar relasional. Pilar struktur terfokus pada reformasi dan penguatan lembaga pemerintah, sedangkan pilar relasional melihat hubungan antarpribadi, kohesi sosial, dan ketahanan komunitas (Bollaert, 2019). Pendidikan perdamaian memiliki peran penting dinegara pasca konflik untuk menyuarkan pencegahan terjadinya konflik, mengkritik ketidakadilan yang terjadi agar membangun perdamaian yang lebih luas. Adapun fungsi dari peace education dalam konteks Sierra Leone, berfungsi jangka panjang yang menjaga kapasitas individu dan kelompok untuk mendukung perdamaian berkelanjutan (Bush & Saltarelli, 2000). Rekonsiliasi yang dilakukan di Sierra Leone pasca perang saudara yang berlangsung sekitar satu decade

perlu untuk memikirkan stabilitas jangka panjang. Pemangku kepentingan lokal dan internasional dilibatkan dalam menjalankan peace education di Sierra Leone dalam pendidikan formal maupun informal, diantaranya UNESCO, Bank Dunia, USAID, LSM seperti Fambul Tok, dan Kementerian Pendidikan Sierra Leone (Yu & Wyness, 2025). Upaya yang dilakukan pertama adalah memahami akar penyebab konflik, sehingga program-program yang dilakukan akan bertujuan untuk menciptakan perdamaian. Mengingat bahwa penyebab perang saudara yang terjadi adalah ketidakadilan. Langkah awal yang dilakukan melalui reformasi pendidikan dengan realiasi pada tahun 2020 terdapat pendidikan dasar gratis, selanjutnya membangun politeknik, dan tahun 2021 memberlakukan Undang-Undang Pendidikan Tinggi, serta membentuk Dewan Nasional untuk Penghargaan Teknik dan Kejuruan. Tindakan ini memperluas akses pendidikan serta upaya memulihkan aspek sosial ekonomi. Pendidikan perdamaian dintegrasikan kedalam kebijakan pendidikan nasional secara resmi pada tahun 2010 yang menekankan pada HAM, nilai demokrasi, dan keadilan social (Yu & Wyness, 2025). Tujuan dari kebijakan ini secara formal untuk menginternalisais pendidikan perdamaian di seluruh kurikulum sekolah, memberikan pelatihan bagi guru-guru, dan dalam scope pendidikan vokasi dengan inisiatif nonformal berbasis masyarakat untuk terciptanya perilaku damai, disiplin dan tanggungjawab sebagai warganegara. Maka dari itu, terlihat bahwa kebijakan ini menjadi upaya dalam memupuk solidaritas nasional dan berkeadilan yang mana merupakan akar masalah terjadinya konflik berkepanjangan di Sierra Leone.

Afrika Selatan tercatat sebagai negara yang memiliki tingkat pembunuhan dan kekerasan berbasis gender tinggi di Dunia (John, 2020). Ditambah terdapat xenophobia akan imigran yang datang menjadikan negara ini memiliki historis negative dimata dunia. Sekolah yang seharusnya menjadi ruang yang aman, tetapi kekerasan juga terjadi disana. Seperti yang diungkapkan oleh (Ndwandwe, 2025) bahwa latar belakang implementasi akan pendidikan perdamaian di Afrika Selatan berasal dari meningkatnya kekerasan di sekolah. Dapat dikatakan bahwa penyebab kekerasan yang terjadi karena tidak adanya toleran dan empati dalam bersikap. Sekolah berfungsi sebagai ruang untuk rekonsiliasi melalui pendekatan berbasis dialog dari Freire yang dapat mengajak siswa untuk merefleksi naraso “us-them” dan mengembangkan kesadaran kritis terkait xenophobia. Peace education memiliki peran strategis dalam membentuk generasi muda yang memiliki toleransi, empati, dan dapat menyelesaikan masalah. Perdamaian umumnya digambarkan mencakup lebih dari sekadar ketiadaan kekerasan atau manajemen konflik yang efektif. Peace education juga menunjukkan perjuangan yang dilakukan secara simultan untuk melakukan perubahan dalam struktur social (Ndwandwe, 2024). Agar terciptanya budaya damai, dalam pelaksanaannya dilapangan memerlukan kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh (Ndwandwe, 2024) bahwa kebijakan pendidikan perdamaian memerlukan peran dari Kepala Sekolah yang memiliki kepemimpinan moral dan keterampilan komunikasi yang baik. Cakupan dari peace education ini dirancang untuk membekali individu untuk dapat hidup secara damai antar kelompok yang bersebrangan seperti minoritas, kelompok etnis, dan mereka yang berasal dari latar belakang sosial yang beragam.

### **Implikasi peace education**

Peace Education memberikan dampak pada anak muda kamboja dengan menjadikan mereka memahami peristiwa sejarah yang dapat menyebabkan konflik (Hodgkinson, 2024). Memahami sejarah kekerasan yang dilakukan oleh Khmer Merah dengan affective recognition berimplikasi pada menutupnya stigma mahasiswa terhadap mantan tentara Khmer Merah. Pendekatan ini mengajak siswa sebagai generasi yang tidak mengalami sejarah kelam negaranya untuk menumbuhkan rasa empati terhadap korban maupun pelaku melalui dialog lintas generasi dengan memahami cerita dari ‘korban’ Khmer Merah yang memiliki memori

personal. Ingatan tersebut didalamnya terdapat pengalaman traumatis akan peristiwa kekejaman dimasa lalu menjadi tandingan dari narasi sejarah tunggal sehingga interpretasi sejarah semakin beragam. Pengalaman pribadi yang diceritakan oleh pelaku sejarah ini tidak diperoleh dalam proses pembelajaran di pendidikan formal. Pemikiran Fraser (dalam Hodgkinson, 2024) menjelaskan bahwa keadilan sosial perlu perubahan transformatif sebuah distrupsi dan dekonstruksi struktur yang kerangka kerjanya mendasari ketidakadilan. Peace education yang diajarkan dengan affective recognition dapat menumbuhkan kepekaan politik dan etika dengan potensi transformatif dan afirmatif untuk berpikir, merasakan, dan berelasi di dalam kelas (Archer et al., 2023; Kruger & Zembylas, 2024; Liubana et al., 2024; Rumsiti & Muslimah, 2021). Hal ini memperluas dari implementasi peace education melalui kedekatan emosional, tidak hanya sebatas kognitif yang biasa digunakan dalam sistem pendidikan sejarah di Kamboja. Melalui program Anlong Veng Tour anak muda kamboja diajak untuk melihat pandangan lain dari sudut pandang pelaku. Mahasiswa yang mengikuti program tersebut dapat dengan cepat menerima pesan pencegahan tanpa menghindari sejarah kekejaman harus dipelajari untuk mencegah terulangnya peristiwa Khmer Merah di Kamboja (Manning & Paulson, 2024).

Istilah etnis menjadi hal yang dianggap ‘ilegal’ di Rwanda karena menjadi hal sensitif yang berkaitan dengan peristiwa genosida. Konten historis menghindari penyebutan Tutsi diistimewakan pada masa kolonial dan Hutu diistimewakan selama dua periode republic setelah kemerdekaan (Schulz & Sentama, 2021). Dapat dikatakan bahwa penyebab istilah sensitive ini karena dapat menimbulkan Kembali konflik antar dua suku tersebut. Penerapan peace education di Rwanda dilakukan sebagai proses penyembuhan sosial melalui narasi sejarah untuk membangun identitas “One Rwanda”. Dalam konteks pendidikan yang berfokus pada ketahanan, praktik eksklusif membentuk identitas nasional itu membatasi kemampuan semua orang untuk merasa diterima dan terhubung dengan warisan mereka sendiri. Dampak yang dirasakan dari peristiwa genosida Rwanda 1994 memberikan pengaruh negatif terhadap unsur kepercayaan dan harapan. Penggunaan MAP dalam pendidikan sejalan dapat mereduksi dampak negatif dari peristiwa sejarah yang kelam tersebut, hal ini sejalan dengan pepatah di Rwanda (Breed & Uwihoreye, 2023) yang berisi “ ‘umwana uzi ubwenge bamusiga yinogereza’ explains that once you get an opportunity to share your story with someone who gives you time and helps you to cope with wounds and emotional problems it is up to you to build your resilience”.

Pascakonflik perang saudara yang terjadi di Sierra Leone, kebijakan pendidikan yang diberlakukan memberikan kesempatan bagi anak-anak disana untuk dapat kembali besekolah. Internalisasi peace education yang seharusnya menciptakan budaya damai, justru berbenturan dengan budaya yang ada, dalam hal ini terkait hukuman fisik di sekolah. Bagi pendidik hukuman fisik perlu dihapus, namun nyatanya masih digunakan sebagai metode pendisiplinan (Yu & Wyness, 2025). Dalam proses pembelajaran didalam kelas masih sering kali menggunakan hafalan dan pendekatan teacher centered, padahal seharusnya pendidikan perdamaian ini perlu melibatkan siswa secara aktif dan berpikir kritis (Akhsanunadia & Arifin, 2026; Aminuddin et al., 2024; Jannah & Widodo, 2026; Kusmini et al., 2025; Kusradi & Wulandari, 2024). Pendidikan yang membangun perdamaian berkelanjutan di Sierra Leone mengalami berbagai keterbatasan seperti sumber daya manusia dalam hal ini guru, sarana prasarana seperti ketersediaan buku teks pendidikan perdamaian yang terstandarisasi, ketimpangan alokasi kesempatan pendidikan antara perkotaan dan pedesaan. Sehingga dampak dari implementasi peace education ini masih belum dirasakan secara optimal (Aminah & Ikramatoun, 2024; Athirah et al., 2025; Herlinda et al., 2020; Lilianti et al., 2021; Nurfaizin & Firdaus, 2025).

Implementasi peace education di Afrika Selatan belum menunjukkan adanya transformasi pendidikan yang arah positif. Secara umum dipahami bahwa perlunya untuk menciptakan budaya damai dilingkungan sekolah. Tetapi hambatan yang dihadapi terlalu kompleks, diantaranya biaya dan waktu yang terbatas, Kurangnya keterlibatan orangtua, respon negatif dari siswa dan guru yang tidak mau mengimplementasikan peace education (Ndwandwe, 2024). Selain itu, dikotomi “us-them” yang dibangun dalam kerangka xenophobia yang mengakar kuat. Tidak ada kesempatan berdialog yang aman sehingga narasi yang terbentuk didominasi dengan memperdalam jurang pemisah antara warga asing dan warga lokal, korban dan pelaku, serta “orang baik dan orang jahat”. Sebagian besar wacana populer tentang hubungan antara warga negara asing dan warga negara lokal bersifat negatif dan melibatkan identitas serta narasi yang terpolarisasi. Kekerasan yang terjadi disekolah juga dipengaruhi oleh situasi di rumah. Siswa sering melihat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di rumah yang Membawa dampak negatif bagi perkembangannya (Ndwandwe, 2024).

## **KESIMPULAN**

Kebijakan tentang penerapan peace education di negara-negara pasca konflik seperti Rwanda, Sierra Leone, Kamboja, dan Afrika Selatan telah dilakukan secara sadar dan diinternalisasi dalam pendidikan. Selain keterlibatan tingkat lokal (sekolah dan komunitas), nasional (pemerintah), umumnya dinegara-negara pasca konflik ini adanya keterlibatan internasional seperti NGO yang ikut serta terlibat dalam mengembangkan peace education. Keinginan untuk membentuk negara yang aman dan damai bagi seluruh lapisan masyarakat menghadapi tantangan yang berbeda-beda, hal ini dipengaruhi oleh latar belakang historis terhadap praktik peace education. Pendidikan tidak sebatas pada transfer pengetahuan, melainkan membangun resolusi konflik melalui dialog, empati dan pemahaman lintas generasi. Pendekatan multiperspektif membawa dampak positif dan negatif secara bersamaan karena berargumentasi terkait narasi tunggal resmi menjadikan bias antara pelaku dan korban dari peristiwa sejarah yang kejam yang rentan menimbulkan ketegangan sosial. Selain itu, penerapan affective recognition dengan melibatkan emosi memberikan rasa kemanusiaan yang lebih menonjol bagi generasi yang tidak mengalami peristiwa sejarah. Melibatkan pengalaman dari pelaku sejarah memberikan pengalaman yang berkesan bagi siswa yang dapat membangun rasa damai. Situasi yang menarik ditemukan di Afrika Selatan bawasannya tantangan dalam menerapkan pendidikan perdamaian telah dilami sejak awal dari faktor internal sehingga sering kali mengalami kegagalan, hal ini berdampak pada kekerasan yang terjadi masih tinggi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmadi, A. (2021). The traces of oppression and trauma to ethnic minorities in Indonesia who experienced rape on the 12 May 1998 tragedy: A review of literature. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 8(2), 126. <https://doi.org/10.29333/ejecs/744>
- Akhsanunadia, A., & Arifin, Z. (2026). Pengaruh media konkrit terhadap motivasi dan pemahaman belajar siswa pada pelajaran matematika di kelas 2. *SCIENCE Jurnal Inovasi Pendidikan Matematika Dan IPA*, 6(1), 219. <https://doi.org/10.51878/science.v6i1.9362>
- Amelia, A., Fikri, A. N., Erlina, E., Ghazi, F., & Kholid, I. (2025). Rekonstruksi pemenuhan hak-hak anak dalam syariat Islam: Analisis kritis terhadap implementasinya dalam pendidikan Islam kontemporer. *LEARNING Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 5(4), 1944. <https://doi.org/10.51878/learning.v5i4.7498>

- Aminah, S., & Ikramatoun, S. (2024). Sinergi pendidikan damai dan kebijakan pemerintah: Studi kasus di MAN 1 Pidie, Aceh. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 5(2), 273. <https://doi.org/10.29103/jspm.v5i2.19946>
- Aminuddin, M. F., Falah, M. R., Salamat, N. S., Suryadi, N. P. P., Sriwahyuni, R. A., Parhan, M., & Syahidin, S. (2024). Paradigma konsep pendidikan hadhari dalam pendidikan Islam. *EDUKATIF JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 6(2), 1066. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v6i2.6194>
- Archer, D. T., Hajir, B., & McInerney, W. W. (2023). *Innovations in peace and education praxis*. Routledge eBooks. <https://doi.org/10.4324/9781003263111>
- Athirah, F., Giyandita, F. S., & Abdurrahmansyah, A. (2025). Evaluasi efektivitas standar proses kurikulum 2013 dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. *MANAJERIAL Jurnal Inovasi Manajemen Dan Supervisi Pendidikan*, 5(3), 832. <https://doi.org/10.51878/manajerial.v5i3.7295>
- Bain, B., Suyahmo, S., Pramono, S. E., Atmaja, H. T., Shokheh, M., & Hartatik, E. S. (2024). Promoting peacebuilding through humanistic learning in history class. *Paramita Historical Studies Journal*, 34(1). <https://doi.org/10.15294/paramita.v34i1.44975>
- Bhaskara, I. L. A. (2024). A road to “unity in diversity”: The case of Indonesia’s Chinese minority group. *Journal of Asian Social Science Research*, 5(2), 123. <https://doi.org/10.15575/jassr.v5i2.80>
- Bollaert, C. (2019). Anchoring concepts: Sustainable peace, identity, culture and worldview. Dalam *Reconciliation and building a sustainable peace* (hlm. 47–81). Palgrave Macmillan Cham. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-03655-3>
- Bransika, D. M. I., Hendri, N., Rozi, S., & Hanani, S. (2025). Penerapan moderasi beragama melalui pendidikan toleransi di SMA Negeri (SMA N) 12 Merangin. *LEARNING Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 5(3), 1158. <https://doi.org/10.51878/learning.v5i3.6617>
- Breed, A., & Uwihoreye, C. (2023). Sharing and listening to stories for peacebuilding in post-genocide Rwanda. *The Journal of Applied Theatre and Performance*, 28(2), 160–171. <https://doi.org/10.1080/13569783.2023.2185130>
- Faiz, Abd. A. (2020). Transformasi konflik agama dan strategi reformatif pada pembangunan budaya damai. *Jurnal Sosiologi Agama*, 14(2), 179. <https://doi.org/10.14421/jsa.2020.142-03>
- Fatikasari, F., Yuwono, A., & Sukoyo, J. (2026). Efektivitas model pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran bahasa Jawa dalam materi sastra piwulang. *LEARNING Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 6(1), 29. <https://doi.org/10.51878/learning.v6i1.8903>
- Gallen, J. (2023). Historical-structural injustice. Dalam *Cambridge University Press eBooks* (hlm. 55). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781009025973.005>
- Herlinda, H., Fitria, H., & Puspita, Y. (2020). Implementasi teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran kurikulum 2013. *Journal of Education Research*, 1(2), 125. <https://doi.org/10.37985/joe.v1i2.11>
- Hodgkinson, K. (2024). Affective recognition: Examining the role of affect in education for peacebuilding in Cambodia and Kosovo. *Journal of Peace Education*, 21(3), 336–356. <https://doi.org/10.1080/17400201.2024.2373729>
- Holm, M., & Deese, R. S. (2022). *How democracy survives*. Informa. <https://doi.org/10.4324/9781003218586>

- Islakh, A. N., Pujiyanto, P., & Adibah, I. Z. (2025). Peran kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum PAI berbasis multikultural. *LEARNING Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 5(2), 982. <https://doi.org/10.51878/learning.v5i2.6440>
- Jannah, N. F., & Widodo, W. (2026). Efektivitas pendekatan socio scientific issues (SSI) pada materi pencemaran lingkungan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis murid SMP. *SCIENCE Jurnal Inovasi Pendidikan Matematika Dan IPA*, 6(1), 593. <https://doi.org/10.51878/science.v6i1.9580>
- John, V. M. (2020). Tackling xenophobia through dialogue: A Freirean approach. *Education as Change*, 24. <https://doi.org/10.25159/1947-9417/6534>
- Karim, A., Putra, N. R., Amiruddin, N., Handoko, A. R. J., Ekklesia, M. V., & Vidyanita, N. (2025). Traumatic memory and family dynamics of political prisoners in Leila S. Chudori's *Namaku Alam*. *Jurnal POETIKA*, 13(1), 51. <https://doi.org/10.22146/poetika.v13i1.105970>
- Khoeriyah, Y., Ruswandi, U., & Erihadiana, M. (2022). Pendidikan multikultural: Konsepsi, urgensi dan relevansinya dalam manajemen pendidikan Islam di Indonesia. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(7), 2523. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i7.708>
- Kruger, F., & Zembylas, M. (2024). Affective atmospheres of coloniality and the decolonisation of peace education: Theoretical insights and political possibilities. *Studies in Philosophy and Education*, 43(6), 691. <https://doi.org/10.1007/s11217-024-09955-2>
- Kusmini, K., Ahyani, N., & Fahmi, M. (2025). Pengaruh kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional terhadap mutu pembelajaran SD negeri di gugus 1 Kecamatan Tungal Jaya. *SOCIAL Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(4), 1353. <https://doi.org/10.51878/social.v5i4.8033>
- Kusnadi, K., & Wulandari, N. A. T. (2024). Pendidikan damai: Memperkuat pemahaman hak asasi manusia dan keadilan sosial. *Jurnal Basicedu*, 8(1), 539. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v8i1.7126>
- Lestari, D. T., & Parihala, Y. (2020). Merawat damai antar umat beragama melalui memori kolektif dan identitas kultural masyarakat Maluku. *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, 3(1), 43. <https://doi.org/10.15575/hanifiya.v3i1.8697>
- Lilianti, L., Asrul, A., Adenisatrawan, A., & Said, H. (2021). Implementasi kebijakan SD-SMP negeri satu atap: Mengapa dan bagaimana. *Didaktis: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Pengetahuan*, 21(1). <https://doi.org/10.30651/didaktis.v21i1.6162>
- Liubana, A., Nugraha, N., Dahlan, D., & Purnamasari, I. (2024). Educating for peace through countering violence strategies in curriculum and instruction. *International Journal of Children's Spirituality*, 1. <https://doi.org/10.1080/1364436x.2024.2391576>
- Manning, P., & Paulson, J. (2024). Some contradictions of multiple perspectives approaches to peace and history education: Lessons from Cambodia. *Ethics and Education*, 19(2), 185–200. <https://doi.org/10.1080/17449642.2024.2362028>
- Ndwandwe, N. D. (2024). Barriers to implementing peace education in secondary schools in South Africa. *Journal of Peace Education*, 21(2), 164–184. <https://doi.org/10.1080/17400201.2024.2367966>
- Ndwandwe, N. D. (2025). Confronting a leadership vacuum: The principal's leadership role in peace education in South African schools. *International Journal of Educational Management*, 38(3), 804–818. <https://doi.org/10.1108/IJEM-03-2023-0099>

- Nurfaizin, F., & Firdaus, A. F. (2025). Kebijakan pemerintah tentang pendidik dan tenaga kependidikan. *MANAJERIAL Jurnal Inovasi Manajemen Dan Supervisi Pendidikan*, 5(2), 310. <https://doi.org/10.51878/manajerial.v5i2.5384>
- Putra, J. N. I., Rahmawati, D., & Jia, C. (2024). Exile trauma and gender relevance in the novel *Pulang: Postmemory studies Marianne Hirsch*. *Jurnal POETIKA*, 12(1), 51. <https://doi.org/10.22146/poetika.v12i1.96336>
- Rahmawati, D., Yusuf, M., & Mubarak, M. (2024). Kerjasama antar ummat beragama dalam bidang pendidikan untuk mewujudkan generasi rahmatan lil alamin. *LEARNING Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 4(2), 174. <https://doi.org/10.51878/learning.v4i2.2828>
- Rumsiti, N., & Muslimah, M. (2021). Reaktualisasi term al-ikhwah melalui peace education guna merespon rasisme dalam dunia pendidikan. *Tadibuna: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 4(1), 85–105. <https://doi.org/10.30659/jpai.4.1.85-105>
- Schulz, M., & Sentama, E. (2021). The relational legacies of colonialism: Peace education and reconciliation in Rwanda. *Third World Quarterly*, 42(5), 1052–1068. <https://doi.org/10.1080/01436597.2020.1853521>
- Sihombing, A. F., & Habeahan, S. (2025). Strategi guru menghadapi perubahan Kurikulum 2013 menjadi Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran di UPT SMP Negeri 24 Medan. *LEARNING Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 5(4), 1548. <https://doi.org/10.51878/learning.v5i4.6682>
- Unisa, L., Azzahra, S. F., Juanda, M., Rahmanda, M. D., & Abdurrahmansya, A. (2025). Problematik implementasi penguatan potensi siswa dalam Kurikulum Merdeka di sekolah dasar. *MANAJERIAL Jurnal Inovasi Manajemen Dan Supervisi Pendidikan*, 5(4), 931. <https://doi.org/10.51878/manajerial.v5i4.7835>
- Utama, E. S. W., Marfu, A., Fauzi, A., & Supardi, S. (2025). Pendidikan dan perubahan sosial budaya. *SOCIAL Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(2), 723. <https://doi.org/10.51878/social.v5i2.5835>
- Yanto, A., Metekohy, L. M., & Patmawati, S. A. (2026). Eksistensi nilai-nilai nasionalisme peninggalan Mohammad Hatta dan Sutan Sjahrir di Pulau Banda. *SOCIAL Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 6(1), 432. <https://doi.org/10.51878/social.v6i1.9727>
- Yu, Y., & Wyness, M. (2025). Peace education in a post-conflict society: The case study of Sierra Leone. *Social Sciences*, 14(9), 541. <https://doi.org/10.3390/socsci14090541>